

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan juga tidak berorientasi pada laba, salah satu dari jenis organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (V. Wiratna, 2015).

Sistem akuntansi pemerintah daerah disebut sebagai model sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan daerah, sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus/defisit dan laporan perhitungan anggaran.

Sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2013 yakni Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan.

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah

yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ponamon, 2018).

Kinerja Pemerintah didasarkan pada kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga berdampak pada perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan pengawasan internal dan manajemen keuangan daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran menurut Whittaker (dalam Susetyo, 2014).

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara intern yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan di sektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan laporan keuangan ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektifitas penggunaan sumber daya (Value For Money) dan terlihat secara jelas outcome yang di hasilkan.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka akan dapat meningkatkan kinerja. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan (Puji Agus, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khodri Zulhman (2015) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ira (2014), dan Nirmalasari (2018) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Dewi (2017) menyimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan sistem akuntansi akuntansi keuangan daerah, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”.

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah”.

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.
- b. Untuk mengetahui Apakah Pengawasan Internal Berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademik

Suatu pengetahuan untuk mahasiswa maupun lingkungan sekitarnya yang mau melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Suatu ilmu yang di pelajari bagi kebijakan objek yang diteliti dalam persoalan-persoalan praktis yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.